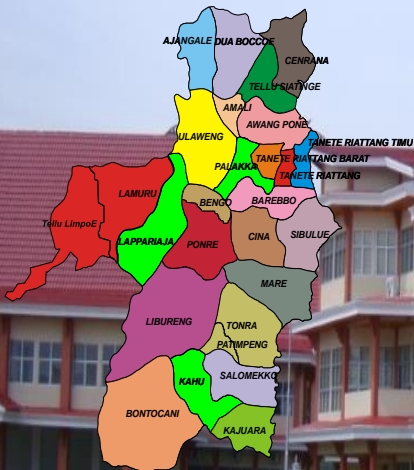




PEMERINTAH KABUPATEN BONE

RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2022



SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

KOMPLEKS STADION LAPATAU WATAMPONE, TELP/FAX (0481) 21015

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONE

Nomor : /SET.DPRD/I/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH (RENJA)
PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2022
SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 yang berkualitas dan memenuhi kaidah sesuai standar yang telah ditetapkan, maka perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Bone tentang pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025;
7. Peraturan Bupati Bone Nomor 64 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2020 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dengan Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone;
- KEDUA : Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 bertugas menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 sesuai Aturan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2022 pada DPA Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku surut sejak tanggal 04 Januari 2022, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal Januari 2022

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,



ALIMUDDIN M., S.Sos.

angkat Pembina Utama Muda
IP : 19610624 198603 1 010

Tembusan. Kepada Yth :

1. Bupati Bone di Watampone
2. Ketua DPRD Kab. Bone sebagai Laporan di Watampone
3. Pertinggal.

Lampiran Keputusan Sekretaris DPRD Kab.Bone

Nomor : /SET.DPRD/I/2022
Tanggal : Januari 2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022
pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dengan Keputusan
Sekretaris DPRD Kab. Bone.

**TIM PENYUSUN
RENCANA KERJA (RENJA)
TAHUN 2022 PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE**

Pembina : A. ALIMUDDIN M., S.Sos. (Sekretaris DPRD)
Ketua : H. SYAMSUL BAHRI, S.Sos., M.M. (Kabag. Keuangan)
Anggota :
1. Dra. A. RAHMAWATI, M.M. (Kabag Umum)
2. ISHAN SAMIN, S.P., M.M. (Kabag. Persidangan dan
perundang-undangan)
3. SALMAN, S.E., M.Si. (Kabag. Fasilitasi Penganggaran &
Pengawasan)
4. Para Kasubag Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal



SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,

A. ALIMUDDIN M., S.Sos.
Pangkat / Pembina Utama Muda
NIP : 19610624 198603 1 010

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas Rahmat dan Hidayah-Nya, kami telah menyelesaikan Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022.

Tujuan Rencana Kerja ini dibuat sebagai arah dan pedoman perencanaan pembangunan tahunan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 yang terurai secara tepat dan terarah pada tingkat kebijakan, program dan kegiatan serta rencana anggaran yang berbasis regulasi, tupoksi dan evaluasi.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone ini secara umum belum mampu memberikan atau menyajikan bentuk yang terbaik, namun kami telah berupaya semaksimal mungkin menyusun laporan ini sehingga dapat memberikan rencana kegiatan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Kami menyadari bahwa Penyusunan Rencana Kerja ini belum sempurna seperti yang diharapkan, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati kami mengharapkan masukan dari segenap pihak yang berkompeten demi perbaikan dan penyempurnaan rencana kerja ini.

Watampone,

SEKRETARIS DPRD KAB.BONE,



IMUDDIN M. S.Sos.

kat. Pembina Utama Muda

. 19610624-198603 1 010

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN	i
LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	9
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Perangkat Daerah	
Tahun Lalu Capaian Renstra Perangkat Daerah	9
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	14
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi	
Perangkat Daerah	16
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	19
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah	28
3.3 Program Dan Kegiatan	29
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PERANGKAT DAERAH	
.....	33
BAB V PENUTUP	
	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut (Rencana OPD) adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun diatur di dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau disebut Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Renja OPD adalah Dokumen Perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun sesuai dengan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah melalui tahapan dan tata cara penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, maka persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone selanjutnya dilakukan dengan penyusunan rancangan dari hasil rapat dengan para Aparatur Sipil Negara Sekretariat DPRD bersama Anggota DPRD Kabupaten Bone kemudian tahapan selanjutnya diadakan Forum bersama stakeholder kemudian dari hasil tersebut ditetapkanlah Renja tersebut.

Di dalam tahapan persiapan penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone meliputi pembentukan Tim Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang orientasinya mengenai rencana kerja 1 (satu) tahun kedepan sesuai dengan agenda kerja Sekretariat DPRD dan Anggota DPRD menghasilkan data informasi yang dikelola sesuai kebutuhan program dan kegiatan yang menunjang untuk meningkatkan harmonisasi kemitraan antara Eksekutif DPRD menunjang penyerapan aspirasi masyarakat dan meningkatkan akuntabilitas kinerja urusan penunjang Sekretariat DPRD.

Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah dokumen perencanaan Sekretariat DPRD Kabupaten periode 1 (satu) tahun yang

memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang berorientasi terhadap pelayanan kesekretariatan Anggota DPRD Kabupaten Bone. Keterkaitan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk dokumen perencanaan 20 (dua puluh) tahun kemudian dipedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perencanaan periode 5 (lima) tahun dan dijabarkan oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun kemudian berpedoman pada dokumen Rencana Strategis untuk priode 5 (lima) tahun yang disebut (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, Skala Prioritas, Visi, Misi dan diselaraskan dengan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sedangkan Renja KL berpedoman kepada Renstra KL dan dipedomani oleh RPJM Nasional dan RPJP Nasional yang merupakan instansi Pusat dan Nasional yang diserahkan melalui musrembang sehingga terjalin saling keterkaitan didalam proses perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat/Provinsi dan Kabupaten Kota.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone adalah merupakan Dokumen Perencanaan untuk priode 1 (satu) Tahun Anggaran yang memuat program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat DPRD Kab. Bone untuk Tahun Anggaran 2022.

Dalam Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yang selanjutnya disebut Renja OPD, disusun oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone. yang telah disusun sesuai rumusan rancangan Renja melalui serangkaian berupa kegiatan pengelolaan data informasi. Analisis gambaran pelayanan sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk selanjutnya di review hasil pelaksanaan Renja tahun lalu berdasarkan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan tidak lupa juga memperhatikan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dan telaah rancangan awal RKPD Kabupten Bone untuk merumuskan tujuan dan sasaran Sekretariat DPRD Kabupaten Bone supaya dapat mengambil langkah-langkah yang penting dalam memperhitungkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada. Rencana ini merupakan suatu proses yang berorientasi dan hasil yang ingin di capai selama satu tahun, dengan tetap memperhatikan potensi yang ada baik sumber daya manusia dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihadapi.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 ini memuat perencanaan strategi dan kebijakan pencapaian target kinerja Tahun 2022 berdasarkan analisis dan evaluasi terhadap realisasi pencapaian kinerja dari pelaksanaan program dan kegiatan organisasi pada tahun sebelumnya yang mengacu pada rencana strategis (Renstra) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka menghadapi dan menjawab isu strategi melalui pelaksanaan program dan kegiatannya selama satu tahun yakni terhitung mulai 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022. Masing-masing kegiatan dilengkapi dengan indikator kinerja dan rencana tingkat capaian atau target sesuai dengan kebijakan yang ditempuh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam melaksanakan program kegiatannya.

1.2 Landasan Hukum

Dalam Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022, Landasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan pimpinan dan Anggota dewan Perwakilan Rakyat Daerah, beberapa kali dirubah, terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengelolaan, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
12. Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Bone;
13. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 07 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 02 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone 2012 -2032;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2013-2018;
17. Peraturan DPRD Kabupaten Bone Nomor 01 Tahun 2012 tentang Peraturan DPRD Kabupaten Bone tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Bone;
18. Peraturan Bupati Bone Nomor 36 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
19. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 3 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018 - 2019.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 disusun dengan mengacu pada rancangan awal rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bone Tahun 2022. Sebagai dokumen perencanaan kinerja tahunan, Renja ini memuat strategi dan kebijakan beserta program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 berdasarkan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone.

Secara spesifik, maksud disusun Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone antara lain :

- 1) Menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 sesuai dengan urusan penunjang Sekretariat DPRD;
- 2) Sebagai pedoman Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun kedepan;
- 3) Sebagai dasar melaksanakan fasilitas fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten Bone.

Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2020 sebagai tujuan bagian dari proses perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bertujuan sebagai berikut:

- 1) Memberikan arah sekaligus sebagai acuan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.
- 2) Meningkatkan kualitas Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam fasilitasi terhadap tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Bone.
- 3) Sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone tahun 2022 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab. 1 Pendahuluan

Memuat rumusan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022.

Bab. 2 Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Menyajikan uraian tentang evaluasi pencapaian kinerja terhadap target kinerja yang tertuang dalam rencana renja dan perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun sebelumnya.

Bab. 3 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Menyajikan uraian tentang evaluasi capaian kinerja terhadap target kinerja yang tertuang dalam Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun 2019-2023, analisis pencapaian kinerja hingga tahun sebelumnya, beserta isu terkait tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone.

Bab. 4 Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Memuat rumusan tentang Tujuan dan Sasaran beserta Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone, yang akan dilaksanakan pada Tahun 2022 disertai dengan penyajian dana indikatif beserta sumbernya dan perkiraan maju tahun berikutnya.

Bab. 5 Penutup

Menyajikan kesimpulan dan harapan atas Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun 2022.

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.

Evaluasi terhadap capaian rencana kerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja tahun lalu dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai pencapaian target kinerja sasaran strategis dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kab. Bone pada tahun sebelumnya, untuk dinilai hasil capaian kinerjanya dan dipelajari hambatan dan kendala yang ada guna perbaikan dan peningkatan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Bone pada tahun-tahun berikutnya. Proses Evaluasi ini dilakukan terhadap 2 (dua) program, 15 (lima belas) kegiatan dan 52 (lima puluh dua) sub kegiatan di tahun 2021, yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Atau Lapangan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitas Fraksi DPRD
- 2) Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 4) Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik
- 5) Penyusunan Tata Tertib DPRD

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS

- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan APBD Perubahan
- 5) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam

13. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Bimbingan Teknis DPRD
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 3) Pelaksanaan RESES

15. Fasilitasi Tugas DPRD

- 1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Dari keseluruhan kegiatan terdapat 1 kegiatan yang tidak terlaksana dari 52 sub kegiatan, 15 kegiatan dan 2 Program disebabkan oleh tidak adanya waktu untuk melaksanakan kegiatan tersebut diakibatkan padatnya jadwal kegiatan Anggota DPRD Kabupaten bone, hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan tahun berjalan dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .2.1.

EVALUASI HASIL RENJA TRIWULAN I, II, III, & IV PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

PERIODE PELAKSANAAN : 2021

SASARAN RKPd YANG AKAN DICAPAI DALAM RENJA PD :

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dan Meningkatkan Status Audit Keuangan Daerah oleh BPK
2. Terjalinnnya Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat untuk menjamin kepastian hukum dan terjalinnnya kerjasama antar pemerintah daerah
3. Meningkatnya Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya

N O	Sasaran		Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra Perangkat Daerah Pada Tahun 2023 (Akhir Periode Renstra perangkat daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja PD Tahun lalu (2020)		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun Berjalan yg dievaluasi (2021)		Realisasi Kinerja Pada Triwulan				Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang Dievaluasi (2021)	Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2019 (Akhir Tahun Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d Tahun 2021 (%)		Unit Perangkat Daerah Penanggung g Jawab					
													I			II		III		IV					
1	2		3	4	5		6		7		8		9		10		11		12 = 8+9+10+11		13 = 6+12		14 = 13/5*100%		15
					K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
1	1 .	Menghasilkan produk Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan yang mendukung proses Pembangunan Jangka Menengah dan Jangka Panjang	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN																						
			SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		100 %	48.395.483.209			100 %	43.667.433.635	18,35%	8.010.917.203	42,75%	18.667.030.827				42,75 %	26.677.948.030	42,75 %	26.677.948.030	42,75%	55,12%		
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (%)	100 %	32.283.503.578			100 %	31.270.888.835	18,55%	5.799.312.504	42,07%	13.155.559.122				42,07 %	18.954.871.626	42,07 %	18.954.871.626	42,07%	58,71%	Sek. DPRD	
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100 %	228.206.330			100 %	283.032.350	12,55%	35.523.600	38,41%	108.703.200				38,41 %	144.226.800	38,41 %	144.226.800	38,41%	63,20%	Sek. DPRD	
	2 .	Mewujudkan kelembagaan DPR RI yang Kuat.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	5	106.513.605			5	235.927.850		2	35.523.600	3	108.703.200				2	144.226.800	2	144.226.800	40,00%	135,41%	
	3 .	Mewujudkan pemahaman masyarakat yang objektif tentang DPR RI	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	8.250.000			-	-		-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA yang Dilaksanakan	2	7.975.000			-	-		-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	4	105.467.725			4	47.104.500		-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100 %	4.108.134.319			100 %	4.135.632.371	19,28%	797.370.999	47,11%	1.948.359.237				47,11 %	2.745.730.236	47,11 %	2.745.730.236	47,11%	66,84%	Sek. DPRD	
	4 .	Mewujudkan Sekretariat Jenderal yang professional.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	39	3.824.625.060			39	3.509.358.421		39	688.940.299	39	1.796.348.337				39	2.485.288.636	39	2.485.288.636	100,00 %	64,98%	
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	20	15.409.548			20	138.825.500		3	14.196.000	3	14.996.000				3	29.192.000	3	29.192.000	15,00%	189,44%	

5	Menguatkan pengawasan internal.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi	12	26.565.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%		
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	5	167.376.000			5	263.487.000	1	61.079.000	1	86.269.400				1	147.348.400	1	147.348.400	20,00%	88,03%	
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	4	74.158.711			4	223.961.450	-	33.155.700	2	50.745.500				-	83.901.200	-	83.901.200	0,00%	113,14%	
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100 %	707.820.575			100 %	292.770.000	2,43%	7.104.000	6,28%	18.400.000				6,28%	25.504.000	6,28%	25.504.000	6,28%	3,60%	Sek. DPRD
		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	65	28.160.000			65	56.040.000	65	7.104.000	65	18.400.000				17	25.504.000	17	25.504.000	26,15%	90,57%	
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40	34.650.000			40	35.130.000	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah sosialisasi peraturan perundang-undangan	4	578.702.575			-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	39	66.308.000			39	201.600.000	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100 %	2.106.108.411			100 %	2.238.331.820	16,73%	374.384.719	40,87%	914.758.165				40,87 %	1.289.142.884	40,87 %	1.289.142.884	40,87%	61,21%	Sek. DPRD
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	56.698.950			6	57.450.000	-	1.000.000	-	14.366.900				-	15.366.900	-	15.366.900	0,00%	27,10%	
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	55.826.067			12	44.021.220	3	9.203.308	6	28.424.090				3	37.627.398	3	37.627.398	25,00%	67,40%	
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan pimpinan DPRD	12	13.756.314			12	27.105.000	-	-	6	14.221.600				-	14.221.600	-	14.221.600	0,00%	103,38%	
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	12	302.940.000			12	325.500.000	3	8.700.000	6	107.600.000				-	116.300.000	-	116.300.000	0,00%	38,39%	
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	24.643.080			12	24.150.000	3	4.500.000	6	9.900.000				-	14.400.000	-	14.400.000	0,00%	58,43%	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	455.301.000			48	400.500.000	12	87.750.000	48	176.460.000				-	264.210.000	-	264.210.000	0,00%	58,03%	
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	155	1.196.943.000			155	1.359.605.600	72	263.231.411	78	563.785.575				72	827.016.986	72	827.016.986	46,45%	69,09%	
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100 %	262.558.703			100 %	2.384.459.638	0,00%	-	0,34%	8.008.000				0,34%	8.008.000	0,34%	8.008.000	0,34%	3,05%	Sek. DPRD

			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	4	-			4	2.000.000.000	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Ketersediaan Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	4	-			-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			Pengadaan Mebel	Ketersediaan Jumlah Pengadaan Mebel	5	73.359.000			-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10	189.199.703			7	384.459.638	-	-	1	8.008.000				-	8.008.000	-	8.008.000	0,00%	4,23%	
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	2	-			-	-	-	-	-	-				-	-	-	-	0,00%	0,00%	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 %	1.123.811.700			100 %	1.064.880.000	17,12%	182.258.852	37,47%	398.980.163				37,47 %	581.239.015	37,47 %	581.239.015	37,47%	51,72%	Sek. DPRD
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	12	16.610.000			12	16.350.000	3	1.600.000	3	3.700.000				3	5.300.000	3	5.300.000	25,00%	31,91%	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	287.248.500			3	271.200.000	3	62.363.142	3	121.084.453				3	183.447.595	3	183.447.595	100,00 %	63,86%	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	116	819.953.200			116	777.330.000	3	118.295.710	3	274.195.710				3	392.491.420	3	392.491.420	2,59%	47,87%	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100 %	937.281.912			100 %	672.818.800	19,15%	128.845.531	37,56%	252.689.792				37,56 %	381.535.323	37,56 %	381.535.323	37,56%	40,71%	Sek. DPRD
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	30	255.115.960			30	429.899.200	5	100.192.202	5	164.752.308				5	264.944.510	5	264.944.510	16,67%	103,85%	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	35	76.118.680			35	9.770.800	4	1.165.329	4	2.190.647				4	3.355.976	4	3.355.976	11,43%	4,41%	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	181	126.500.000			181	161.800.000	5	27.488.000	45	75.796.837				5	103.284.837	5	103.284.837	2,76%	81,65%	
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	479.547.272			6	71.348.800	-	-	2	9.950.000				-	9.950.000	-	9.950.000	0,00%	2,07%	
			Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100 %	21.968.209.635			100 %	19.337.837.128	21,43%	4.145.002.833	47,25%	9.137.680.524				47,25 %	13.282.683.357	47,25 %	13.282.683.357	47,25%	60,46%	Sek. DPRD
			Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	45	21.470.858.385			45	19.122.962.128	45	4.145.002.833	45	8.956.330.524				45	13.101.333.357	45	13.101.333.357	100,00 %	61,02%	
			Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	45	415.676.250			45	214.875.000	-	-	45	181.350.000				-	181.350.000	-	181.350.000	0,00%	43,63%	

			Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang Dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	81.675.000			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%			
			Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	100 %	841.371.993			100 %	861.126.728	14,96%	128.821.970	42,73%	367.980.041				42,73 %	496.802.011	42,73 %	496.802.011	42,73%	59,05%	Sek. DPRD
			Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	12	13.365.000			12	16.200.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	253.352.000			12	334.600.000	3	32.720.000	6	117.508.000				3	150.228.000	3	150.228.000	25,00%	59,30%	
			Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	574.654.993			12	510.326.728	3	96.101.970	6	250.472.041				3	346.574.011	3	346.574.011	25,00%	60,31%	
			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100 %	16.111.979.631			100 %	12.396.544.800	17,84%	2.211.604.699	44,46%	5.511.471.705				44,46 %	7.723.076.404	44,46 %	7.723.076.404	44,46%	47,93%	Sek. DPRD
			Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100 %	383.542.786			100 %	244.020.800	0,00%	-	2,40%	5.868.700				2,40%	5.868.700	2,40%	5.868.700	2,40%	1,53%	Sek. DPRD
			Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	5	72.768.685			1	27.528.300	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	9	105.270.000			9	9.900.000	-	-	-	665.000				-	665.000	-	665.000	0,00%	0,63%	
			Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rapat kajian perundang-undangan	4	64.900.000			2	58.305.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/ Keterangan dan/ atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	12	140.604.101			2	136.037.500	-	-	1	4.188.700				-	4.188.700	-	4.188.700	0,00%	2,98%	
			Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah penyusunan tata tertib DPRD	1	0,00			1	12.250.000	-	-	1	1.015.000				-	1.015.000	-	1.015.000	0,00%	0,00%	
			Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	100 %	119.282.625			100 %	88.350.000	0,00%	-	0,00%	-				0,00%	-	0,00%	-	0,00%	0,00%	Sek. DPRD
			Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan KUA PPAS	2	26.575.285			2	24.350.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	2	15.840.000			2	16.000.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2	37.762.340			2	16.000.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	2	19.800.000			2	16.000.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawabana APBD	2	19.305.000			2	16.000.000	-	-	-	-				-	-	-	0,00%	0,00%		
			Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100 %	930.567.000			100 %	753.030.000	19,49%	146.760.000	27,35%	205.945.000				27,35 %	352.705.000	27,35 %	352.705.000	27,35%	37,90%	Sek. DPRD
			Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	72	251.460.000			72	199.260.000	3	33.150.000	36	47.700.000				3	80.850.000	3	80.850.000	4,17%	32,15%	

TINDAK LANJUT YAG DIPERLUKAN DALAM RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERIKUTNYA :

- 1. Penguatan Sekretariat DPRD Kab. Bone melalui peningkatan anggaran serta sarana prasarana agar lebih memadai sesuai dgn beban kerja
- 2. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan pengembangan kompetensi dan kapasitas SDM melalui rekrutmen pegawai yg kompeten dan diklat/bimtek sesuai kebutuhan Sekretariat DPRD Kab. Bone

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam menentukan kinerja pelayanan perangkat Daerah mempunyai tolok ukur berdasarkan indikator kinerja yang telah ditentukan format tolok ukur indikator kinerja dibuat sebagai berikut :

Tabel analisis pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 diuraikan sebagai berikut :

Tabel .2.2.
**Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone**

No	Indikator	SPM Standar Nasiona 1	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks kepuasan pelayanan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD			70	71	72	73	70	71	73	75	
2	Persentase aspirasi masyarakat yang ditindak lanjuti oleh DPRD			100	100	100	100	100	100	100	100	
3	Persentase memfasilitasi Ranperda			100	100	100	100	100	100	100	100	
4	Predikat Evaluasi Sakip oleh APIP			CC	B	B	B	B	B	B	BB	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

1. Tingkat Kinerja Pelayanan SKPD

Berdasarkan pengukuran, evaluasi dan analisis pencapaian target kinerja Tahun 2021, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dengan pencapaian kinerja keuangan sebagai berikut :

- Belanja Pegawai 94.08% (sangat baik)
- Belanja Barang dan Jasa 98.21% (sangat baik)
- Belanja Modal 92.03% (sangat baik)

Tingkat kinerja secara umum pada Sekretariat DPRD Kabupaten Bone sudah berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tetapi masih banyak yang harus di benahi/diperbaiki sesuai dengan perkembangan dan tuntutan dari masyarakat dengan pelayanan yang optimal dan belanja pegawai dengan target 100% yang terealisasi 94.08%, belanja barang dan jasa dengan target 100% yang terealisasi 98.21% sedangkan belanja modal terealisasi 92.03%.

2. Permasalahan dan hambatan

Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam menyelenggarakan Tugas Pokok dan Fungsinya untuk mewujudkan visi dan misi Yang telah ditetapkan telah dijumpai beberapa permasalahan dan hambatan dalam melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yaitu :

- a. Belum optimalnya penyimpanan, pengelolaan data, dan pelayanan administrasi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- b. Terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- c. Terbatasnya tenaga terampil dan profesional baik dari kualitas maupun kuantitas yang sesuai dengan bidang tugasnya di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Bone;
- d. Belum optimalnya kapasitas Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi, meliputi fungsi Legislasi, Penganggaran, dan Pengawasan;
- e. Ranperda Inisiatif DPRD masih sangat minim karena komitmen DPRD yang masih kurang dalam penyusunan dan pembahasan Perda Inisiatif;
- f. Banyaknya kasus pengaduan masyarakat yang masuk namun tidak diimbangi dengan kemampuan dan jumlah sumber daya manusia yang ada, sehingga banyak kasus yang belum dapat segera diselesaikan.

3. Tantangan dan Peluang

a. Tantangan

Tantangan atau ancaman datang dari luar Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang akan berpengaruh terhadap jalannya roda organisasi dalam mencapai tingkat keberhasilannya.

Beberapa tantangan atau ancaman tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Agenda reformasi terus bergulir dan salah satu dampaknya adalah tuntutan aspirasi masyarakat semakin kritis dan beragam yang mengarah pada tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah semakin berkurang. Ini semua merupakan tantangan tersendiri bagi aparatur pemerintah, khususnya para Pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan kepada DPRD yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat;
- 2) Krisis ekonomi yang berkepanjangan merupakan salah satu dampak negatif dari krisis multi dimensional yang melanda negara kita yang berakibat pada menurunnya kemampuan pembiayaan pemerintah. Hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 3) Belum lengkapnya peraturan pelaksanaan dari penyempurnaan/revisi Perundang-undangan yang telah dilakukan, seperti Peraturan Pemerintah dan Keputusan Menteri, khususnya yang menyangkut pelayanan Administrasi Pemerintahan.

b. Peluang

Beberapa peluang yang akan mendukung kelancaran Pelaksanaan Tupoksi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam mencapai Visi dan Misinya diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Mengadakan sarana dan prasarana yang memadai guna mendukung pelaksanaan tugas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone;
- 2) Menyiapkan Sumber Daya Manusia yang terampil sesuai dengan bidangnya tugasnya untuk meningkatkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi;

- 3) Tuntutan permintaan peningkatan kualitas pelayanan administrasi pemerintahan dari DPRD, merupakan peluang bagi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengembangkan kemampuannya agar dapat memenuhi permintaan tersebut;
- 4) Kondisi Keamanan di daerah yang relatif stabil bila dibandingkan dengan daerah lain, akan memberikan pengaruh bagi berkembangnya pelaksanaan administrasi pemerintahan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD.

Review terhadap rancangan akhir Sekretariat DPRD Kabupaten Bone Tahun 2022 dimuat dalam tabel sebagai berikut :

Tabel .2.3.

Review terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2022
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

No	Rancangan Akhirl RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE										
	43.995.893.828,00										
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	29.348.639.618,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	29.348.639.618,00	
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	207.460.300	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	207.460.300	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	5	96.830.550	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	5	96.830.550	Sekretariat DPRD
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7.500.000	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.250.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.250.000	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	95.879.750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	95.879.750	
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	3.734.667.563,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	3.734.667.563,00	
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. TR. Barat	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	39	3.476.931.873,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. TR. Barat	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	39	3.476.931.873,00	Sekretariat DPRD
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	14.008.680,00	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	14.008.680,00	
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	24.150.000,00	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	24.150.000,00	
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	23	152.160.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	23	152.160.000,00	
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	12	67.417.010,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	12	67.417.010,00	
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	643.473.250,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	643.473.250,00	
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. TR. Barat	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	65	25.600.000,00	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. TR. Barat	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	65	25.600.000,00	Sekretariat DPRD
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40	31.500.000,00	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40	31.500.000,00	
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	526.093.250,00	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	526.093.250,00	
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	60.280.000,00	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	60.280.000,00	

4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.914.644.010,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.914.644.010,00	
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	51.544.500,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	51.544.500,00	Sekretariat DPRD
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	50.750.970,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	50.750.970,00	
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan pimpinan DPRD	12	12.505.740,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan pimpinan DPRD	12	12.505.740,00	
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	12	275.400.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	12	275.400.000,00	
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	22.402.800,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12	22.402.800,00	
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	413.910.000,00	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	413.910.000,00	
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	155	1.088.130.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	155	1.088.130.000,00	
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	238.689.730,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	238.689.730,00	
21	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	28	66.690.000,00	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	28	66.690.000,00	
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	17	171.999.730,00	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	17	171.999.730,00	
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.021.647.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.021.647.000,00	
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	12	15.100.000,00	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	12	15.100.000,00	Sekretariat DPRD
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	261.135.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	261.135.000,00	
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	116	745.412.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	116	745.412.000,00	
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	852.074.466,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	852.074.466,00	
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. TR. Barat	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	7	231.923.600,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. TR. Barat	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	7	231.923.600,00	Sekretariat DPRD
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	50	69.198.800,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	50	69.198.800,00	
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	200	115.000.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	200	115.000.000,00	
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	435.952.066,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	435.952.066,00	
8)	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	19.971.099.669,00	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	19.971.099.669,00	
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	45	19.518.962.169,00	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	45	19.518.962.169,00	Sekretariat DPRD
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	45	377.887.500,00	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD		Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	45	377.887.500,00	
32	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Ketersediaan Medical Check Up yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	74.250.000,00	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Ketersediaan Medical Check Up yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	74.250.000,00	
9)	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Layanan Administrasi DPRD	100%	764.883.630,00	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Layanan Administrasi DPRD	100%	764.883.630,00	
33	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	6	12.150.000,00	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	6	12.150.000,00	Sekretariat DPRD
34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	230.320.000,00	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	230.320.000,00	

35	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	522.413.630,00	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	522.413.630,00	
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100%	14.647.254.210,00	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100%	14.647.254.210,00	
10)	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	348.675.260,00	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	348.675.260,00	
36	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	1	66.153.350,00	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	1	66.153.350,00	Sekretariat DPRD
37	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	9	95.700.000,00	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	9	95.700.000,00	
38	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah rapat kajian perundang-undangan	2	59.000.000,00	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah rapat kajian perundang-undangan	2	59.000.000,00	
39	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	2	127.821.910,00	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	2	127.821.910,00	
11)	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	108.438.750,00	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	108.438.750,00	
40	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan KUA PPAS	2	24.159.350,00	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan KUA PPAS	2	24.159.350,00	Sekretariat DPRD
41	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	2	14.400.000,00	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	2	14.400.000,00	
42	Pembahasan APBD		Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2	34.329.400,00	Pembahasan APBD		Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2	34.329.400,00	
43	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	2	18.000.000,00	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	2	18.000.000,00	
44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	17.550.000,00	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	17.550.000,00	
12)	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	845.970.000,00	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	845.970.000,00	
45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	228.600.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	228.600.000,00	Sekretariat DPRD
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	218.400.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	218.400.000,00	
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	193.590.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	193.590.000,00	
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Perekonomian	12	205.380.000,00	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Perekonomian	12	205.380.000,00	
13)	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.926.720.000,00	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.926.720.000,00	
49	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis oleh pimpinan dan anggota DPRD	3	1.451.220.000,00	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis oleh pimpinan dan anggota DPRD	3	1.451.220.000,00	Sekretariat DPRD
50	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	48	241.500.000,00	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	48	241.500.000,00	
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah pembayaran jasa kelompok pakar dan tim ahli	5	90.000.000,00	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah pembayaran jasa kelompok pakar dan tim ahli	5	90.000.000,00	
52	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah pembayaran jasa tenaga ahli tim fraksi anggota DPRD	8	144.000.000,00	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah pembayaran jasa tenaga ahli tim fraksi anggota DPRD	8	144.000.000,00	
14)	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	10.725.510.200,00	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	10.725.510.200,00	
53	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	4	8.225.970.000,00	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	4	8.225.970.000,00	Sekretariat DPRD
54	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah penyusunan pokok-pokok pikiran	5	86.256.500,00	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah penyusunan pokok-pokok pikiran	5	86.256.500,00	
55	Pelaksanaan Reses		Jumlah cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	2.413.283.700,00	Pelaksanaan Reses		Jumlah cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	2.413.283.700,00	
15)	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	100%	691.940.000,00	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	100%	691.940.000,00	
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	5	691.940.000,00	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	5	691.940.000,00	Sekretariat DPRD

BAB III

TUJUAN SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone dalam RPJMD untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati Bone Tahun 2019 - 2023 yaitu : **“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”**, ada 3 (tiga) point yang menjadi hal utama yaitu yang pertama Masyarakat Bone yang Mandiri Kedua Masyarakat Bone yang Berdaya Saing Ketiga Masyarakat Bone yang Sejahtera.

Masyarakat Bone yang Mandiri dapat dimaknakan sebagai kemampuan nyata Pemerintah dan Masyarakatnya dalam mengatur dan mengurus ,kepentingan Daerah/rumah tangganya sendiri menurut prakarsa dan aspirasi Masyarakatnya termasuk didalamnya sungguh-sungguh. Secara bertahap sanggup mengurangi ketergantungan daerah lain yang saling menguntungkan. **Masyarakat Bone Berdaya Saing** dapat diartikan sebagai terwujudnya kemampuan masyarakat Bone untuk memanfaatkan keunggulan Inovasi, komparatif yang berbasis sumber daya lokal dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan sehingga mampu bersaing secara Regional, Nasional, Internasional. **Masyarakat Bone yang Sejahtera** mengandung makna semakin meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar yang berkelanjutan dalam Aspek ekonomi, pendidikan , kesehatan dan politik, sosial budaya, lingkungan hidup yang dilengkapi dengan suasana kehidupan yang religius aman dan kondusif serta didukung infrastruktur dan tata kelolah Pemerintahan yang Baik.

Bupati dan Wakil Bupati terpilih telah mencenangkan Visi dan Misi serta program strategi yang akan dilakukan selama masa pemerintahan 5 tahun kedepan adalah sebagai berikut :

a. Visi Jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2019-2023 yaitu :

“Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera”

b. Dalam rangka mencapai Visi Jangka Menengah Kabupaten Bone tahun 2019-2023, Misi yang ditempuh sebagai berikut :

Misi 1 : Meningkatkan tata kelolah pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)

Misi 2 : Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Misi 3 : Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.

Misi 4 : Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.

Misi 5 : Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.

Misi 6 : Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut, Sekretariat DPRD Kabupaten Bone yang merupakan salah satu SKPD di Kabupaten Bone memiliki peran yang strategis untuk mewujudkan Visi tersebut, Sekretariat DPRD yang merupakan unsur pelayanan di DPRD memiliki tugas pokok dan fungsi memfasilitasi kegiatan DPRD untuk melahirkan produk-produk hukum yang berkualitas yang berhubungan dengan Visi Sehat, Cerdas dan Sejahtera.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran harus dipilih strategi yang tepat agar dapat meningkatkan kinerja dan mengarahkan pada Visi dan Misi. Strategi merupakan Rencana aksi terpadu yang mencakup penetapan kebijakan dan program operasional. Strategi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone menjelaskan pemikiran-pemikiran secara konseptual analitis, dan komprehensif tentang langkah-langkah yang diperlukan untuk memperlancar atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Strategi dimaksudkan untuk mencapai hasil yang konsisten dengan Visi-Misi-Tujuan-Sasaran yang telah ditetapkan.

Strategi yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dengan mengikuti dalam diklat/bimtek/sosialisasi dan lain-lain.
2. Meningkatkan kapasitas, kunjungan kerja DPRD berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, meliputi legislasi, penganggaran dan pengawasan
3. Mengoptimalkan sistem pendataan, pelaporan dan evaluasi kinerja Sekretariat DPRD.

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat, agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone. Kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, system dan prosedur maupun alokatif seperti sumber daya, dana, dan waktu. Kebijakan diharapkan dapat :

1. Memberikan petunjuk prinsip-prinsip, rambu-rambu dan signal-signal penting dalam menyusun program dan kegiatan;
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan;
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksanaan (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat;
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi.

Kebijakan yang ditetapkan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2019-2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Pelayanan administrasi perkantoran Sekretariat DPRD.
2. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan DPRD

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategis, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Bone dalam jangka waktu tahunan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Keselarasan antara visi, Misi, Tujuan, Sasaran, strategi dan kebijakan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone untuk tahun 2019-2023 terlihat pada tabel berikut:

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kabupaten Bone

No.	Tujuan	Sasaran		Indikator Sasaran		Tahun					
						2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatkan Harmonisasi Kemitraan Eksekutif dengan DPRD yang Menunjang Penyerapan Aspirasi Masyarakat	1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD	1	Indeks Kepuasan Sekretariat DPRD kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	70%	71%	72%	73%	74%	75%
		2	Meningkatnya Aspirasi Masyarakat yang Diakomodir Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD	2	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				3	Persentase Memfasilitasi Ranperda	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Penunjang Sekretariat DPRD	3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Urusan Sekretariat DPRD	4	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	B	B	B	B	BB

3.3 Program dan Kegiatan

Program-program yang ditetapkan merupakan program-program yang berada dalam lingkup kebijakan tertentu. Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumberdaya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Adapun program dan kegiatan Tahun 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Bone merencanakan 2 (Dua) Program yaitu :

I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
- 3) Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
- 4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
- 5) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulan / Semesteran SKPD

3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
- 2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 3) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
- 4) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
- 4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- 5) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- 6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- 7) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi

5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Pengadaan Mebel
- 2) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

- 3) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- 1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Atau Lapangan
- 2) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan
- 3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 4) Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

8. Layanan Keuangan Kesejahteraan DPRD

- 1) Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
- 2) Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
- 3) Pelaksanaan Medical Check Up DPRD

9. Layanan Administrasi DPRD

- 1) Fasilitasi Fraksi DPRD
- 2) Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
- 3) Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD

II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD

10. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD

- 1) Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
- 2) Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
- 3) Penyelenggaraan Kajian Perundang-undangan
- 4) Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan Atau Naskah Akademik

11. Pembahasan Kebijakan Anggaran

- 1) Pembahasan KUA dan PPAS
- 2) Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
- 3) Pembahasan APBD
- 4) Pembahasan APBD Perubahan
- 5) Pembahasan Pertanggung Jawaban APBD

12. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- 1) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum
- 2) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
- 3) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 4) Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian

13. Peningkatan Kapasitas DPRD

- 1) Bimbingan Teknis DPRD
- 2) Publikasi dan Dokumentasi Dewan
- 3) Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
- 4) Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi

14. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat

- 1) Kunjungan Kerja Dalam Daerah
- 2) Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
- 3) Pelaksanaan RESES

15. Fasilitasi Tugas DPRD

1) Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD

Dari 2 (Dua) Program tersebut di implementasikan melalui 15 (Lima Belas) Kegiatan dan 56 (Lima Puluh Enam) Sub Kegiatan. Agar Program dan Kegiatan yang telah ditentukan dapat terlaksana secara efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan dan sasaran maka perlu ditetapkan indikator kinerja dan sasaran yang ingin dicapai dan disertai dengan dana indikatif yang dibutuhkan. Indikator kinerja dan kelompok sasaran serta dana indikatif program dan kegiatan tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bone (sebagaimana terlampir).

	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)
--	--------------------------------	--------	-------------------	----------------	---------------------

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE				43.995.893.828,00
I	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah	100%	29.348.639.618,00
1)	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	100%	207.460.300
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	5	96.830.550
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	7.500.000
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD		Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	7.250.000
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	12	95.879.750
2)	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	3.734.667.563,00
5	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. TR. Barat	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	39	3.476.931.873,00
6	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	12	14.008.680,00
7	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12	24.150.000,00
8	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	23	152.160.000,00
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD		Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	12	67.417.010,00
3)	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	100%	643.473.250,00
10	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Kec. TR. Barat	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	65	25.600.000,00
11	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya		Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	40	31.500.000,00
12	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan		Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	1	526.093.250,00
13	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	1	60.280.000,00
4)	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	100%	1.914.644.010,00
14	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. TR. Barat	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	6	51.544.500,00
15	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12	50.750.970,00
16	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah penyediaan peralatan rumah	12	12.505.740,00

			tangga dan pimpinan DPRD		
17	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	12	275.400.000,00
18	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah penyediaan barang cetak dan penggandaan	12	22.402.800,00
19	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan		Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	48	413.910.000,00
20	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	155	1.088.130.000,00
5)	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	238.689.730,00
21	Pengadaan Mebel		Jumlah Pengadaan Mebel	28	66.690.000,00
22	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	17	171.999.730,00
6)	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1.021.647.000,00
23	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	12	15.100.000,00
24	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	3	261.135.000,00
25	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	116	745.412.000,00
7)	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	100%	852.074.466,00
26	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	7	231.923.600,00
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kec. TR. Barat	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	50	69.198.800,00
28	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	200	115.000.000,00
29	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah gedung kantor yang terpelihara	6	435.952.066,00
8)	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	100%	19.971.099.669,00
30	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD		Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	45	19.518.962.169,00
31	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	45	377.887.500,00
32	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD		Ketersediaan Medical Check Up yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	45	74.250.000,00
9)	Layanan Administrasi DPRD		Jumlah Layanan Administrasi DPRD	100%	764.883.630,00
33	Fasilitasi Fraksi DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	6	12.150.000,00

34	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD		Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	12	230.320.000,00
35	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD		Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	12	522.413.630,00
II	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	100%	14.647.254.210,00
10)	Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	100%	348.675.260,00
36	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	1	66.153.350,00
37	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah		Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	9	95.700.000,00
38	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan		Jumlah rapat kajian perundang-undangan	2	59.000.000,00
39	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik		Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	2	127.821.910,00
11)	Pembahasan Kebijakan Anggaran		Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	100%	108.438.750,00
40	Pembahasan KUA dan PPAS	Kec. TR. Barat	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan KUA PPAS	2	24.159.350,00
41	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS		Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	2	14.400.000,00
42	Pembahasan APBD		Jumlah kegiatan pembahasan APBD	2	34.329.400,00
43	Pembahasan APBD Perubahan		Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	2	18.000.000,00
44	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD		Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	2	17.550.000,00
12)	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	845.970.000,00
45	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum		Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	12	228.600.000,00
46	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	218.400.000,00
47	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	12	193.590.000,00
48	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian		Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Perekonomian	12	205.380.000,00
13)	Peningkatan Kapasitas DPRD		Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	100%	1.926.720.000,00
49	Bimbingan Teknis DPRD		Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis oleh pimpinan dan anggota DPRD	3	1.451.220.000,00
50	Publikasi dan Dokumentasi Dewan		Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	48	241.500.000,00
51	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli		Jumlah pembayaran jasa kelompok pakar dan tim ahli	5	90.000.000,00
52	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi		Jumlah pembayaran jasa tenaga ahli tim fraksi anggota DPRD	8	144.000.000,00
14)	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	10.725.510.200,00
53	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	4	8.225.970.000,00

54	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD		Jumlah penyusunan pokok-pokok pikiran	5	86.256.500,00
55	Pelaksanaan Reses		Jumlah cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	3	2.413.283.700,00
15)	Fasilitasi Tugas DPRD		Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	100%	691.940.000,00
56	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	5	691.940.000,00

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran yang ingin dicapai pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun 2022, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022
dan Prakiraan Maju Tahun 2023
Provinsi Sulawesi Selatan Kabupaten Bone

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BONE

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023	
							Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rp.000)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.000)
(1)					(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4					UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN								
4	02				SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH								43.995.893.828
4	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Jumlah Capaian Realisasi Kegiatan Perangkat Daerah (%)	Kec. TR. Barat	100%	29.348.639.618	APBD		100%	48.395.482.508
4	02	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah tepat waktu	Kec. TR. Barat	100%	207.460.300	APBD		100%	228.206.330
4	02	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tersusun	Kec. TR. Barat	5	96.830.550	APBD		5	106.513.605
4	02	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kec. TR. Barat	2	7.500.000	APBD		2	8.250.000
4	02	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kec. TR. Barat	2	7.250.000	APBD		2	7.975.000
4	02	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	Kec. TR. Barat	12	95.879.750	APBD		12	105.467.725
4	02	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan dokumen Laporan Keuangan Tepat Waktu	Kec. TR. Barat	100%	3.734.667.563,00	APBD		100%	4.108.133.618
4	02	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah realisasi pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Kec. TR. Barat	39	3.476.931.873,00	APBD		39	3.824.625.060
4	02	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah realisasi pelaksanaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD	Kec. TR. Barat	12	14.008.680,00	APBD		12	15.409.548
4	02	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kec. TR. Barat	12	24.150.000,00	APBD		12	26.565.000
4	02	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	Kec. TR. Barat	23	152.160.000,00	APBD		23	167.376.000
4	02	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/semesteran SKPD	Kec. TR. Barat	12	67.417.010,00	APBD		12	74.158.010
4	02	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah rata-rata nilai perilaku pegawai Perangkat daerah berdasarkan penilaian Kinerja ASN	Kec. TR. Barat	100%	643.473.250,00	APBD		100%	707.820.575
4	02	01	2.05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah peningkatan sarana dan prasarana disiplin pegawai	Kec. TR. Barat	65	25.600.000,00	APBD		65	28.160.000
4	02	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Kec. TR. Barat	40	31.500.000,00	APBD		40	34.650.000
4	02	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Kec. TR. Barat	1	526.093.250,00	APBD		1	578.702.575
4	02	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Kec. TR. Barat	1	60.280.000,00	APBD		1	66.308.000
4	02	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Pemenuhan Administrasi Umum Kantor	Kec. TR. Barat	100%	1.914.644.010,00	APBD		100%	2.106.108.411

4	02	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kec. TR. Barat	6	51.544.500,00	APBD		6	56.698.950
4	02	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Kec. TR. Barat	12	50.750.970,00	APBD		12	55.826.067
4	02	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga dan pimpinan DPRD	Kec. TR. Barat	12	12.505.740,00	APBD		12	13.756.314
4	02	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan penyediaan bahan logistik kantor	Kec. TR. Barat	12	275.400.000,00	APBD		12	302.940.000
4	02	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kec. TR. Barat	12	22.402.800,00	APBD		12	24.643.080
4	02	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Kec. TR. Barat	48	413.910.000,00	APBD		48	455.301.000
4	02	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi Sekretariat DPRD	Kec. TR. Barat	155	1.088.130.000,00	APBD		155	1.196.943.000
4	02	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pemenuhan Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. TR. Barat	100%	238.689.730,00	APBD		100%	262.558.703
4	02	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Pengadaan Mebel	Kec. TR. Barat	28	66.690.000,00	APBD		28	73.359.000
4	02	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Kec. TR. Barat	17	171.999.730,00	APBD		17	189.199.703
4	02	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemenuhan Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. TR. Barat	100%	1.021.647.000,00	APBD		100%	1.123.811.700
4	02	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah pembayaran penyediaan surat menyurat	Kec. TR. Barat	12	15.100.000,00	APBD		12	16.610.000
4	02	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kec. TR. Barat	3	261.135.000,00	APBD		3	287.248.500
4	02	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran jasa pelayanan umum kantor	Kec. TR. Barat	116	745.412.000,00	APBD		116	819.953.200
4	02	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	Kec. TR. Barat	100%	852.074.466,00	APBD		100%	937.281.912
4	02	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah pemeliharaan kendaraan dinas operasional dan pajak kendaraan dinas operasional	Kec. TR. Barat	7	231.923.600,00	APBD		7	255.115.960
4	02	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah pembayaran pajak, pemeliharaan kendaraan dinas operasional DPRD	Kec. TR. Barat	50	69.198.800,00	APBD		50	76.118.680
4	02	01	2.09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin yang terpelihara	Kec. TR. Barat	200	115.000.000,00	APBD		200	126.500.000
4	02	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	Kec. TR. Barat	6	435.952.066,00	APBD		6	479.547.272
4	02	01	2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Jumlah Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	Kec. TR. Barat	100%	19.971.099.669,00	APBD		100%	21.968.209.635
4	02	01	2.15	01	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan dan hak-hak keuangan anggota DPRD Kab. Bone	Kec. TR. Barat	45	19.518.962.169,00	APBD		45	1.470.858.385
4	02	01	2.15	02	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah pengadaan pakaian dinas pimpinan dan anggota DPRD beserta atributnya	Kec. TR. Barat	45	377.887.500,00	APBD		45	415.676.250
4	02	01	2.15	03	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Ketersediaan Medical Check Up yang dilaksanakan Pimpinan dan Anggota DPRD	Kec. TR. Barat	45	74.250.000,00	APBD		45	81.675.000
4	02	01	2.16		Layanan Administrasi DPRD	Jumlah Layanan Administrasi DPRD	Kec. TR. Barat	100%	764.883.630,00	APBD		100%	841.371.993
4	02	01	2.16	02	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Rapat Fraksi yang Difasilitasi Sekretariat DPRD	Kec. TR. Barat	6	12.150.000,00	APBD		6	13.365.000
4	02	01	2.16	03	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Kec. TR. Barat	12	230.320.000,00	APBD		12	253.352.000
4	02	01	2.16	04	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah persediaan kebutuhan rumah tangga pimpinan DPRD	Kec. TR. Barat	12	522.413.630,00	APBD		12	574.654.993
4	02	02			PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Jumlah Capaian realisasi kegiatan perangkat daerah (%)	Kec. TR. Barat	100%	14.647.254.210,00	APBD		100%	16.111.979.631,00
4	02	02	2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Kec. TR. Barat	100%	348.675.260,00	APBD		100%	383.542.786
4	02	02	2.01	01	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah penyusunan peraturan daerah dan peraturan DPRD yang tersusun	Kec. TR. Barat	1	66.153.350,00	APBD		1	72.768.685

4	02	02	2.01	02	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah rapat-rapat pembahasan rancangan peraturan daerah yang difasilitasi	Kec. TR. Barat	9	95.700.000,00	APBD		9	105.270.000
4	02	02	2.01	03	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah rapat kajian perundang-undangan	Kec. TR. Barat	2	59.000.000,00	APBD		2	64.900.000
4	02	02	2.01	04	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah penyusunan, kajian dan naskah akademik peraturan daerah	Kec. TR. Barat	2	127.821.910,00	APBD		2	140.604.101
4	02	02	2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Pembahasan Kebijakan Anggaran	Kec. TR. Barat	100%	108.438.750,00	APBD		100%	119.282.625
4	02	02	2.02	01	Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan KUA PPAS	Kec. TR. Barat	2	24.159.350,00	APBD		2	26.575.285
4	02	02	2.02	02	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah kegiatan pembahasan KUA PPAS	Kec. TR. Barat	2	14.400.000,00	APBD		2	15.840.000
4	02	02	2.02	03	Pembahasan APBD	Jumlah kegiatan pembahasan APBD	Kec. TR. Barat	2	34.329.400,00	APBD		2	37.762.340
4	02	02	2.02	04	Pembahasan APBD Perubahan	Jumlah kegiatan pembahasan perubahan APBD	Kec. TR. Barat	2	18.000.000,00	APBD		2	19.800.000
4	02	02	2.02	06	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah pembahasan pertanggungjawaban APBD	Kec. TR. Barat	2	17.550.000,00	APBD		2	19.305.000
4	02	02	2.03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Kec. TR. Barat	100%	845.970.000,00	APBD		100%	930.567.000
4	02	02	2.03	01	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah kegiatan pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum	Kec. TR. Barat	12	228.600.000,00	APBD		12	251.460.000
4	02	02	2.03	02	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	Kec. TR. Barat	12	218.400.000,00	APBD		12	240.240.000
4	02	02	2.03	03	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Infrastruktur	Kec. TR. Barat	12	193.590.000,00	APBD		12	212.949.000
4	02	02	2,03	04	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Kunjungan Pengawasan Urusan di Bidang Perekonomian	Kec. TR. Barat	12	205.380.000,00	APBD		12	225.918.000
4	02	02	2.04		Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah Peningkatan Kapasitas DPRD	Kec. TR. Barat	100%	1.926.720.000,00	APBD		100%	2.119.392.000
4	02	02	2.04	02	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah pelaksanaan bimbingan teknis oleh pimpinan dan anggota DPRD	Kec. TR. Barat	3	1.451.220.000,00	APBD		3	1.596.342.000
4	02	02	2.04	03	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah kegiatan publikasi dan dokumentasi kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	Kec. TR. Barat	48	241.500.000,00	APBD		48	265.650.000
4	02	02	2.04	04	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah pembayaran jasa kelompok pakar dan tim ahli	Kec. TR. Barat	5	90.000.000,00	APBD		5	99.000.000
4	02	02	2.04	05	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah pembayaran jasa tenaga ahli tim fraksi anggota DPRD	Kec. TR. Barat	8	144.000.000,00	APBD		8	158.400.000
4	02	02	2.05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Kec. TR. Barat	100%	10.725.510.200,00	APBD		100%	11.798.061.220
4	02	02	2.05	01	Kunjungan Kerja Dalam Daerah	Jumlah pelaksanaan kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD	Kec. TR. Barat	4	8.225.970.000,00	APBD		4	9.048.567.000
4	02	02	2.05	02	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah penyusunan pokok-pokok pikiran	Kec. TR. Barat	5	86.256.500,00	APBD		5	94.882.150
4	02	02	2.05	03	Pelaksanaan Reses	Jumlah cakupan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat	Kec. TR. Barat	3	2.413.283.700,00	APBD		3	2.654.612.070
4	02	02	2.08		Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah Fasilitasi Tugas DPRD	Kec. TR. Barat	100%	691.940.000,00	APBD		100%	761.134.000
4	02	02	2.08	01	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh anggota DPRD	Kec. TR. Barat	5	691.940.000,00	APBD		5	761.134.000

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone sebagai rencana jangka pendek dalam rangka mewujudkan Rencana Strategis (RENSTRA) 2019-2023, Visi dan Misi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone, telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang memuaskan atas capaian kinerja sasaran-sasaran strategisnya. Indikator kinerja sasaran yang mengindikasikan kepada 4 (Empat) sasaran strategis sebagian besar telah dapat direalisasi 100% bahkan ada yang mencapai diatas 100%. Hal ini menunjukkan adanya komitmen Sekretariat DPRD Kabupaten Bone untuk mewujudkan visi sekaligus misinya pada tahun mendatang.

Seluruh capaian kinerja tersebut, baik yang belum mencapai 100% telah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kami dalam upaya untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis atas capaian kinerja 2021 kami merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan di masa akan datang yaitu sebagai berikut :

1. Upaya lebih mendorong pengembangan kebijakan pembangunan daerah yang berfokus pada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pemanfaatan peluang.
2. Penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan lebih akurat, cermat dan tetap konsisten pada afiliasi visi, misi, Renstra, kebijakan, program yang telah disepakati sebagai komitmen yang utuh, sehingga indikator kinerja yang ditetapkan lebih dahulu disepakati secara bersama-sama oleh stakeholders, pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi dan dibarengi dengan upaya pengawasan yang lebih optimal.
3. Lebih meningkatnya disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketepatan waktu pelaksanaan

Akhirnya, kami beserta segenap aparat Sekretariat DPRD Kabupaten Bone mengharapkan agar Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 ini dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas kepada stakeholders dan sebagai sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja.